

# Beras PSBB ....

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

mastikan akan meminta peran aktif masyarakat desa untuk membuat dapur umum. Dapur-dapur umum itu akan diprioritaskan untuk warga yang tidak mendapatkan bantuan-bantuan tersebut.

"Sebelumnya kita juga telah mengumpulkan perusahaan. Kami imbau agar perusahaan saat memberikan bantuan untuk berkoordinasi dengan pemerintah, sehingga mendapatkan penunjukan daerah yang kurang mendapatkan bantuan. Jadi ada pemerataan bantuan itu tujuan kita," ujarnya.

Cellica juga meminta warga untuk tidak khawatir dengan PSSB. Ia menyebutkan PSBB berbeda dengan lockdown.

"Ini hanya pembatasan aktivitas berkumpul secara besar," ucapnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, memiliki peran sosialisasi bersama TNI dan Polri untuk memberikan pemahaman PSBB.

"PSBB ini atas ajuan gubernur, bukan hanya Kabupaten Karawang saja. Saya minta warga untuk paham, ini demi memutus mata rantai penyebaran virus," ucapnya.

Ia menjelaskan aktivitas masyarakat selama PSBB tetap dapat berjalan, hanya saja harus menggunakan protokol kesehatan.

"Ekonomi tetap bisa berjalan hanya harus ikuti aturannya. Boleh tidak keluar?

Boleh, ada protokolernya misal naik motor harus satu KK, klo beda gak boleh. Mobil harus 50 persen dari kapasitas. PSBB jangan diartikan sesuatu yang serem atau lockdown. Enggak kayak gitu," ujarnya.

Distribusi Lamban  
Sementara itu sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Karawang, menilai distribusi bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 di Karawang lamban.

Padahal menurut mahasiswa yang tergabung dari IMM, PMII, HMI, GMNI, GMKI dan KAMMI itu, Karawang sudah ditetapkan sebagai zona merah Covid-18 sejak awal April 2020 lalu oleh Pemprov Jabar.

"Pemkab Karawang memang sudah membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19, hanya progres yang dilakukan masih berkatut di wilayah angka, seperti perhitungan ODP PDP dan pasien Positif. Penilaian progres itu kami simpulkan dari berbagai pandangan masyarakat," ujar Ketua IMM Kabupaten Karawang, Ichsan Maulana, Minggu (3/5/2020).

Meski begitu, lanjut Ichsan, Cipayung Plus Kabupaten Karawang, mencoba mengkonfirmasi dengan mengirim surat permohonan data yang diterima langsung oleh Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19

Karawang.

"Di surat itu ada tiga poin utama yang kami tanyakan berkaitan dengan Data Progres Penanganan (Kesehatan), data penerima bansos, dan prediksi sekaligus langkah Pemkab kedepan terhadap dampak pandemi ini," paparnya.

Namun, lanjut dia, Sudah lima hari terhitung sejak surat diterima, tidak ada tanggapan yang serius dari Gugus Tugas Covid-19 Karawang. Artinya progres kerja gugus tugas hasilnya belum signifikan.

"Terlebih kami menyoroti persoalan data penerima bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Bahkan Dinas Sosial belum mampu menunjukkan data itu secara terbuka. Kami meyakini bahwa masih banyak data yang validitasnya diragukan, maka besar kemungkinan bansos itu menjadi polemik baru ditengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Cipayung Plus Karawang juga menghimbau agar Pemkab dapat menghimpun data secara riil dan up to date yang kemudian ditampilkan ke publik by name by address agar terwujud efektivitas dan ketepatan sarannya.

"Dalam prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ada prinsip partisipasi dan transparansi. Bagi Kami Pemkab Karawang dalam hal tata kelola dan manajemen data sangat buruk," pungkasnya. (rie/shn)